



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.610, 2017

KEMEN-UMKM. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 /PER/M.KUKM/IV/2017

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maka perlu diatur kelas jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Persediaan Pegawai adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dimiliki saat ini.
3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan Kelas Jabatan untuk pejabat dalam jabatan pelaksana berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Kelas Jabatan untuk pejabat dalam jabatan pelaksana dapat dinaikkan ke dalam Kelas Jabatan yang lebih tinggi apabila:
 - a. terdapat jabatan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam unit kerjanya;
 - b. memenuhi kriteria pendidikan;
 - c. terdapat anggaran tunjangan kinerja; dan
 - d. memiliki capaian kehadiran dan capaian kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Kelas Jabatan untuk pejabat dalam jabatan pelaksana dapat diturunkan ke dalam Kelas Jabatan yang lebih rendah apabila :
 - a. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. tidak memenuhi capaian kehadiran dan capaian kinerja selama satu tahun.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Perubahan kelas jabatan pada Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan melalui Surat Keterangan Kepala Biro Umum.

Pasal 4

- (1) Perubahan Kelas Jabatan bagi pegawai yang diberhentikan dari jabatan struktural ke dalam jabatan pelaksana, penetapan Kelas Jabatannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang pemberhentian dari jabatan strukturalnya.

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, penetapan Kelas Jabatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang pindah dari instansi lain ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, penetapan Kelas Jabatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Penempatan di

lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tunjangan kinerja sepanjang terdapat anggaran tunjangan kinerja yang sesuai dengan Kelas Jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 07/PER/M.KUKM/III/2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 421), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PER/M.KUKM/IV/2017
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR DAN
 JABATAN PENGAWAS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro	16
2	Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing	16
3	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	16
4	SEKRETARIS KEMENTERIAN	17
5	Kepala Biro Perencanaan	15
6	Kepala Bagian Data	12
7	Kepala Sub Bagian. Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
8	Kepala Sub Bagian Jaringan Data dan Informasi	9
9	Kepala Sub Bagian Pelayanan Data dan Informasi	9
10	Kepala Bagian Rencana dan Program	12
11	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9
12	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kesejahteraan Rakyat	9
13	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Ekonomi, Keuangan dan Industri.	9
14	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12
15	Kepala Sub Bagian Pemantauan Program	9
16	Kepala Sub Bagian Evaluasi	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
17	Kepala Sub Bagian Kerjasama Internasional	9
18	Kepala Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	12
19	Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Koperasi	9
20	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan UMKM	9
21	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Non Sektoral	9
22	Kepala Biro Keuangan	15
23	Kepala Bagian Perbendaharaan	12
24	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran	9
25	Kepala Sub Bagian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	9
26	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Keuangan	9
27	Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi	12
28	Kepala Sub Bagian Verifikasi	9
29	Kepala Sub Bagian Akuntansi	9
30	Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan	9
31	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	12
32	Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Penyaluran	8
33	Kepala Sub Bagian Akuntansi Barang Milik Negara	9
34	Kepala Sub Bagian Penghapusan	9
35	Kepala Biro Umum	15
36	Kepala Bagian Tata Usaha	12
37	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	9
38	Kepala Sub Bagian Persuratan	8
39	Kepala Sub Bagian Kearsipan	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
40	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9
41	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian	9
42	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli	9
43	Kepala Bagian Kepegawaian	12
44	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian	9
45	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai	9
46	Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai	9
47	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan	12
48	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	9
49	Kepala Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban	8
50	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan	9
51	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum	12
52	Kepala Sub Bagian Protokol	8
53	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi	9
54	Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum	9
55	Inspektur	15
56	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	9
57	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN	17
58	Sekretaris Deputy Bidang Kelembagaan	15
59	Kepala Bagian Perencanaan	12
60	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program	9
61	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
62	Kepala Bagian Umum	12
63	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
64	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
65	Asisten Deputi Penyuluhan	15
66	Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan	12
67	Kepala Sub Bidang Teknik Penyuluhan	9
68	Kepala Sub Bidang Profesi Penyuluh	9
69	Kepala Bidang Sosialisasi	12
70	Subbidang Penyiapan Bahan Sosialisasi	9
71	Subbidang Pelaksanaan Sosialisasi	9
72	Kepala Bidang Kaderisasi	12
73	Kepala Sub Bidang Potensi Kader	9
74	Kepala Sub Bidang Pembinaan Kader	9
75	Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	15
76	Kepala Bidang Pendirian Koperasi	12
77	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Pendirian Koperasi	9
78	Kepala Sub Bidang Pengesahan Koperasi	9
79	Kepala Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	12
80	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	9
81	Kepala Sub Bidang Persetujuan dan Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	9
82	Kepala Bidang Pembubaran Koperasi	12
83	Kepala Sub Bidang Pembubaran	9
84	Kepala Sub Bidang Penyelesaian	9
85	Asisten Deputi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan	15
86	Kepala Bidang Penerapan Peraturan Perundang-Undangan	12
87	Kepala Sub Bidang Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
88	Kepala Sub Bidang Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
89	Kepala Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan	12
90	Kepala Sub Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi	9
91	Kepala Sub Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
92	Kepala Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan	12
93	Subbidang Dokumentasi peraturan Perundang-undangan Koperasi	9
94	Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
95	Asisten Deputi Tatalaksana Koperasi dan UMKM	15
96	Kepala Bidang Tata Kelola Koperasi	12
97	Kepala Sub Bidang Pengembangan Tata Kelola Koperasi	9
98	Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Koperasi	9
99	Kepala Bidang Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah	12
100	Kepala Sub Bidang Pengembangan Tata Kelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
101	Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
102	Kepala Bidang Akuntabilitas Koperasi	12
103	Kepala Sub Bidang Sistem Akuntabilitas Usaha	9
104	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja	9
105	Asisten Deputi Keanggotaan	15
106	Kepala Bidang Partisipasi Modal dan Usaha	12
107	Kepala Sub Bidang Partisipasi Modal	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
108	Kepala Sub Bidang Partisipasi Usaha	9
109	Kepala Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota	12
110	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Program Kerja	9
111	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Pertanggungjawaban	9
112	Kepala Bidang Promosi Anggota	12
113	Kepala Sub Bidang Promosi Ekonomi Anggota	9
114	Kepala Sub Bidang Pengembangan Promosi Non Ekonomi Anggota	9
115	DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN	17
116	Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan	15
117	Kepala Bagian Perencanaan	12
118	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program	9
119	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
120	Kepala Bagian Umum	12
121	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
122	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
123	Asisten Deputi Simpan Pinjam	15
124	Kepala Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP	12
125	Kepala Sub Bidang Literasi KSP dan USP	9
126	Kepala Sub Bidang Penumbuhan KSP dan USP	9
127	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP	12
128	Kepala Sub Bidang Pengembangan KSP dan USP	9
129	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan KSP dan USP	9
130	Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan	12

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
131	Kepala Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Keuangan	9
132	Kepala Sub Bidang Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP	9
133	Asisten Deputi Permodalan	15
134	Kepala Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri	12
135	Kepala Sub Bidang Permodalan Sendiri Koperasi	9
136	Kepala Sub Bidang Permodalan Sendiri UMKM	9
137	Kepala Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah	12
138	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dana Cadangan	9
139	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dana Hibah	9
140	Kepala Bidang Kredit Program	12
141	Kepala Sub Bidang Kredit Program Koperasi	9
142	Kepala Sub Bidang Kredit Program UMKM	9
143	Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal	15
144	Kepala Bidang Asuransi	12
145	Kepala Sub Bidang Asuransi Umum	9
146	Kepala Sub Bidang Asuransi Kredit	9
147	Kepala Bidang Penjaminan	12
148	Kepala Sub Bidang Penjaminan Kredit	9
149	Kepala Sub Bidang Penjaminan Simpanan Koperasi	9
150	Kepala Bidang Pasar Modal	12
151	Kepala Sub Bidang Obligasi dan Surat Hutang	9
152	Kepala Sub Bidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan	9
153	Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan	15
154	Kepala Bidang Lembaga Pembiayaan	12
155	Kepala Sub Bidang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Anjak Piutang	
156	Kepala Sub Bidang Gadai dan Fidusia	9
157	Kepala Bidang Dana Bergulir	12
158	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dana Bergulir	9
159	Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Dana Bergulir	9
160	Kepala Bidang Perpajakan	12
161	Kepala Sub Bidang Perpajakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9
162	Kepala Sub Bidang Perpajakan Usaha Mikro	9
163	Asisten Deputi Pembiayaan Syariah	15
164	Kepala Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS	12
165	Kepala Sub Bidang Literasi Keuangan Syariah	9
166	Kepala Sub Bidang Penumbuhan KSPPS dan USPPS	9
167	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS	12
168	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pembiayaan KSPPS dan USPPS	9
169	Kepala Sub Bidang Fasilitas Pengembangan dan Pendayagunaan ZISWAF	9
170	Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah	12
171	Kepala Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Keuangan Syariah	9
172	Kepala Sub Bidang Advokasi Akses Pembiayaan KSPPS dan USPPS	9
173	DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN	17
174	Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
175	Kepala Bagian Perencanaan	12
176	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program	9
177	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
178	Kepala Bagian Umum	12
179	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
180	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
181	Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan	15
182	Kepala Bidang Tanaman Pangan	12
183	Kepala Sub Bidang Padi-Padian	9
184	Kepala Sub Bidang Palawija	9
185	Kepala Bidang Holtikultura	12
186	Kepala Sub Bidang Tanaman Hias dan Sayur-Sayuran	9
187	Kepala Sub Bidang Tanaman Obat dan Buah-Buahan	9
188	Kepala Bidang Perkebunan	12
189	Kepala Sub Bidang Tanaman Keras	9
190	Kepala Sub Bidang Tanaman Semusim	9
191	Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan	15
192	Kepala Bidang Perikanan	12
193	Kepala Sub Bidang Perikanan Laut	9
194	Kepala Sub Bidang Perikanan Darat	9
195	Kepala Bidang Peternakan	12
196	Kepala Sub Bidang Ternak Besar	9
197	Kepala Sub Bidang Ternak Kecil	9
198	Kepala Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan	12
199	Kepala Sub Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	9
200	Kepala Sub Bidang Pengolahan Hasil Peternakan	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
201	Asisten Deputi Industri dan Jasa	15
202	Kepala Bidang Industri Manufacturing	12
203	Kepala Sub Bidang Logam	9
204	Kepala Sub Bidang Non Logam	9
205	Kepala Bidang Industri Kreatif	12
206	Kepala Sub Bidang Kerajinan	9
207	Kepala Sub Bidang Non Kerajinan	9
208	Kepala Bidang Jasa dan Aneka Usaha	12
209	Kepala Sub Bidang Jasa	9
210	Kepala Sub Bidang Aneka Usaha	9
211	Asisten Deputi Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	15
212	Kepala Bidang Standarisasi	12
213	Kepala Sub Bidang Standarisasi Produk	9
214	Kepala Sub Bidang Standarisasi Manajemen Mutu	9
215	Kepala Bidang Sertifikasi	12
216	Kepala Sub Bidang Sertifikasi Produk	9
217	Kepala Sub Bidang Sertifikasi Manajemen	9
218	Kepala Bidang Kemasan dan Merk	12
219	Kepala Sub Bidang Kemasan	9
220	Kepala Sub Bidang Merk	9
221	Asisten Deputi Pemasaran	15
222	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran	12
223	Kepala Sub Bidang Sarana Pemasaran	9
224	Kepala Sub Bidang Prasarana Pemasaran	9
225	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemasaran	12

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
226	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemasaran Dalam Negeri	9
227	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemasaran Luar Negeri	9
228	Kepala Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha	12
229	Kepala Sub Bidang Kerjasama Pemasaran	9
230	Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha	9
231	DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA	17
232	Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha	15
233	Kepala Bagian Perencanaan	12
234	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program	9
235	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
236	Kepala Bagian Umum	12
237	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
238	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
239	Asisten Deputi Bidang Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha	15
240	Kepala Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha	12
241	Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha Koperasi	9
242	Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi UMKM	9
243	Kepala Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha	12
244	Kepala Sub Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha Koperasi	9
245	Kepala Sub Bidang Standardisasi Restrukturisasi usaha UMKM	9
246	Kepala Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha	12
247	Kepala Sub Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha Koperasi	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
248	Kepala Sub Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	9
249	Asisten Deputi Pendampingan Usaha	15
250	Kepala Bidang Pendampingan Usaha Terpadu	12
251	Kepala Sub Bidang Pendampingan Usaha Koperasi	9
252	Kepala Sub Bidang Pendampingan Usaha UMKM	9
253	Kepala Bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha	12
254	Kepala Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha Koperasi	9
255	Kepala Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha UMKM	9
256	Kepala Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha	12
257	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Pendampingan Usaha	9
258	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Pendampingan Usaha	9
259	Asisten Deputi Pengembangan dan Penguatan Usaha	15
260	Kepala Bidang Kemitraan Usaha	12
261	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi	9
262	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kemitraan Usaha UMKM	9
263	Kepala Bidang Penguatan Usaha	12
264	Kepala Sub Bidang Penguatan Usaha Koperasi	9
265	Kepala Sub Bidang Penguatan Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9
266	Kepala Bidang Pemantauan Kemitraan Usaha	12
267	Kepala Sub Bidang Pemantauan Kemitraan Usaha Koperasi	9
268	Kepala Sub Bidang Pemantauan Kemitraan Usaha UMKM	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
269	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Usaha	15
270	Kepala Bidang Advokasi Usaha	12
271	Kepala Sub Bidang Advokasi Usaha Usaha Koperasi	9
272	Kepala Sub Bidang Advokasi Usaha UMKM	9
273	Kepala Bidang Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi	12
274	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi Koperasi	9
275	Kepala Sub Bidang Fasilitas Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi UMKM	9
276	Kepala Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana	12
277	Kepala Sub Bidang Perlindungan Legalitas Usaha	9
278	Kepala Sub Bidang Perlindungan Dampak Bencana	9
279	Asisten Deputi Pengembangan Investasi	15
280	Kepala Bidang Fasilitasi Kerjasama Investasi	12
281	Kepala Sub Bidang Fasilitas Kerjasama Investasi Bilateral	9
282	Kepala Sub Bidang Fasilitas Kerjasama Investasi Multilateral	9
283	Kepala Bidang Fasilitasi Investasi Produk Unggulan	12
284	Kepala Sub Bidang Penguatan Kluster	9
285	Kepala Sub Bidang Fasilitas Investasi Bursa Berjangka	9
286	Kepala Bidang Fasilitasi Pencadangan Usaha	12
287	Kepala Sub Bidang Pencadangan Usaha Koperasi	9
288	Kepala Sub Bidang Pencadangan Usaha UMKM	9
289	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	17
290	Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
291	Kepala Bagian Perencanaan	12
292	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program	9
293	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
294	Kepala Bagian Umum	12
295	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
296	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
297	Asisten Deputi Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	15
298	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi	12
299	Kepala Subbidang Peningkatan Kualitas Fasilitator	9
300	Kepala Subbidang Peningkatan Pengelola Koperasi	9
301	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	12
302	Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Media Pendidikan dan Latihan Koperasi	9
303	Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	9
304	Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	12
305	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kurikulum Diklat	9
306	Kepala Sub Bidang Pengembangan Materi Diklat	9
307	Asisten Deputi Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	15
308	Kepala Bidang Pengembangan Standarisasi Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12
309	Kepala Sub Bidang Pengembangan Standarisasi Sumber Daya Manusia Koperasi	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
310	Kepala Sub Bidang Pengembangan Standarisasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
311	Kepala Bidang Fasilitasi Sertifikasi Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	12
312	Kepala Sub Bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi	9
313	Kepala Sub Bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil Menengah	9
314	Kepala Bidang Advokasi Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	12
315	Kepala Sub Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi	9
316	Kepala Sub Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
317	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kewirausahaan	15
318	Kepala Bidang Penumbuhan Kewirausahaan	12
319	Kepala Sub Bidang Permasalahatan Kewirausahaan	9
320	Kepala Sub Bidang Fasilitas Kewirausahaan	9
321	Kepala Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan	12
322	Kepala Sub Bidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan	9
323	Kepala Sub Bidang Penguatan Kewirausahaan	9
324	Kepala Bidang Lembaga Kewirausahaan	12
325	Kepala Sub Bidang Jaringan Kewirausahaan	9
326	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Kewirausahaan	9
327	Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat	15
328	Kepala Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi	12
329	Kepala Subbidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
330	Kepala Subbidang Perkuatan Lembaga Pendidikan dan Latihan	9
331	Kepala Bidang Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan	12
332	Kepala Subbidang dukungan Organisasi Kemasyarakatan	9
333	Kepala Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyaarakatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
334	Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama	12
335	Kepala Subbidang Kerjasama Pelatihan Keterampilan Teknis	9
336	Kepala Subbidang Kerjasama Pemagangan	9
337	Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian	15
338	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi	12
339	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan Koperasi	9
340	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Koperasi	9
341	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12
342	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro	9
343	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Kecil dan Menengah	9
344	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya	12
345	Kepala Sub Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumber Daya	9
346	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumberdaya	9
347	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN	17
348	Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan	15
349	Kepala Bagian Perencanaan	12

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
350	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program	9
351	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
352	Kepala Bagian Umum	12
353	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
354	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
355	Asisten Deputi Kepatuhan	15
356	Kepala Bidang Kepatuhan Legal	12
357	Kepala Subbidang Bidang Peraturan dan Hukum	9
358	Kepala Subbidang Evaluasi Penerapan Peraturan dan Hukum	9
359	Kepala Bagian Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan	12
360	Kepala Sub Bidang Kepatuhan Usaha	9
361	Kepala Sub Bidang Kepatuhan Keuangan	9
362	Kepala Bidang Kepatuhan Transaksi	12
363	Kepala Sub Bidang Pencegahan Transaksi Mencurigakan	9
364	Kepala Sub Bidang Analisis dan Pelaporan	9
365	Asisten Deputi Bidang Pemeriksaan Kelembagaan	15
366	Kepala Bidang Pemeriksaan Organisasi	12
367	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Manajemen Organisasi	9
368	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Manajemen Usaha	9
369	Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan	12
370	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan	9
371	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Kinerja Keuangan	9
372	Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan	12
373	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Internal	9
374	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Internal	9
375	Asisten Deputi Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
376	Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional	12
377	Kepala Sub Bidang Penghimpunan Dana	9
378	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Penyaluran Dana	9
379	Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah	12
380	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana	9
381	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pembiayaan	9
382	Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam	12
383	Kepala Sub Bidang Audit Financial	9
384	Kepala Sub Bidang Audit Khusus	9
385	Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam	15
386	Kepala Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional	12
387	Kepala Subbidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	9
388	Kepala Sub Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	9
389	Kepala Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Syariah	12
390	Kepala Sub Bidang Penilaian Kesehatan KSP Pola Syariah	9
391	Kepala Sub Bidang Penilaian Kesehatan USP Pola Syariah	9
392	Kepala Bidang Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan	9
393	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Rekomendasi	15
394	Kepala Sub Bidang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi	12
395	Asisten Deputi Penerapan Sanksi	9
396	Kepala Bidang Pelaksana Sanksi	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
397	Kepala Sub Bidang Sanksi Administrasi	12
398	Kepala Sub Bidang Pelimpahan Perkara	9
399	Kepala Bidang Pemantauan	9
400	Kepala Sub Bidang Pemantauan Pelaksanaan Sanksi	12
401	Kepala Sub Bidang Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan	9
402	Kepala Bidang Rehabilitasi	9
403	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Kelembagaan	9
404	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Usaha	9

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttt

AAGN. PUSPAYOGA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PER/M.KUKM/IV/2017
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
	Analisis Kepegawaian Pertama	8
	Analisis Kepegawaian Muda	9
2	Analisis Kebijakan Pertama	8
	Analisis Kebijakan Muda	9
3	Arsiparis Pelaksana	6
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
	Arsiparis Penyelia	8
	Arsiparis Pertama	8
4	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5
	Asisten Apoteker Pelaksana	6
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7
	Asisten Apoteker Penyelia	8
5	Auditor Pelaksana	6
	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
	Auditor Penyelia	8
	Auditor Pertama	8
	Auditor Muda	9
	Auditor Madya	11

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
6	Bidan Pelaksana Pemula	5
	Bidan Pelaksana	6
	Bidan Pelaksana Lanjutan	7
	Bidan Penyelia	8
	Bidan Pertama	8
7	Dokter Pertama	9
8	Dokter Gigi Pertama	9
9	Peneliti Pertama	8
	Peneliti Muda	9
	Peneliti Madya	11
	Peneliti Utama	13
10	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
11	Perawat Pelaksana Pemula	5
	Perawat Pelaksana	6
	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
	Perawat Penyelia	8
	Perawat Pertama	8
12	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5
	Perawat Gigi Pelaksana	6
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
	Perawat Gigi Penyelia	8
13	Perencana Pertama	8
	Perencana Muda	9
	Perencana Madya	11
14	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
	Pranata Komputer Pelaksana	6
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
	Pranata Komputer Penyelia	8
	Pranata Komputer Pertama	8
	Pranata Komputer Muda	9
	Pranata Komputer Madya	11
16	Pustakawan Pelaksana	6
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	Pustakawan Penyelia	8
	Pustakawan Pertama	8
	Pustakawan Muda	9
17	Widyaiswara Pertama	8
	Widyaiswara Muda	9

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PER/M.KUKM/IV/2017
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KELAS JABATAN JABATAN PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	5
2	Bendaharawan Penerimaan	7
3	Bendaharawan Pengeluaran	7
4	Caraka	3
5	Operator Mesin	3
6	Pemelihara Gedung dan Bangunan	4
7	Pengadministrasi Kepegawaian	6
8	Penata Laporan Keuangan	6
9	Penelaah Permasalahan Hukum	7
10	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6
11	Pengagenda Surat	3
12	Penganalisis Organisasi	7
13	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	7
14	Pengelola Diklat	6
15	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	7
16	Penyusun Bahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	7
17	Analisis Kerjasama	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
18	Analisis Kebutuhan BMN	7
19	Analisis Kebutuhan Diklat	7
20	Penyusun Laporan Keuangan	7
21	Analisis Pemberdayaan Koperasi dan UKM	7
22	Petugas Keamanan	3
23	Komandan Regu Satpam	4
24	Koordinator Satpam	5
25	Petugas Protokol	5
26	Sekretaris	6
27	Teknisi Mesin	5
28	Verifikator	6
29	Penevaluasian Pelaksana Kegiatan dan Anggaran	7
30	Pengemudi	3

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA